

RINGKASAN

Supiatun, 2020, Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Jemput, Online dan Langsung Perizinan Terpadu Satu Pintu (JEMPOLAN PTSP) Terhadap Percepatan Layanan Perizinan, Dra. Bernadeta Nefo E.W.,M.Si, Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP.,137 hal + xviii

Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. Terdapat beberapa bidang layanan yang menjadi data laporan masyarakat. Perizinan menjadi salah satu bidang pelayanan yang masih perlu lagi dibenahi terkait dengan tatanan pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan yang disusun dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Jemput, Online dan Langsung Perizinan Terpadu Satu JEMPOLAN PTSP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Layanan Jemput, Online dan Langsung Perizinan Terpadu Satu Pintu (JEMPOLAN PTSP) Terhadap Percepatan Layanan Perizinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dimana implementasi kebijakan ini menggunakan teori dari Van Metter dan Horn (Dalam Agustino, 2016:133-136) melalui beberapa indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Implementasi/pelaksanaan kebijakan peraturan bupati Kabupaten Probolinggo nomor 18 tahun 2018 tentang layanan jemput, online dan langsung perizinan terpadu satu pintu Jempolan PTSP sudah berjalan cukup baik, hal itu dilihat dari respon masyarakat dan juga tata cara pelaksanaannya. Yang dilakukan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan serta standar operasional prosedur yang telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Disamping itu pula pemerintah Kabupaten Probolinggo terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Pemerintah, Pelayanan

SUMMARY

Supiatun, 2020, Implementation of Probolinggo District Regents Regulations Number 18 year 2018 Pickup Service, Online and Direct One-Stop Licensing Services (JEMPOLAN PTSP) Against the Acceleration of Licensing Services, Dra. Bernadeta Nefo E.W., M.Sc., Husni Mubaroq, S.Fil.I., M.IP., 137 pages + xviii

The low quality of services in Indonesia currently encourages the government to immediately improve the quality of its services. There are several service areas that are used as community reporting. Licensing is one area of service that still needs to be improved in relation to the order of its implementation. The government of Indonesia seeks to improve the efficiency of business activities by accelerating the implementation set out in regent regulation number 18 year 2018 concerning pick up, online and direct integrated licensing services of one JEMPOLAN PTSP. The purpose of this study is to analyze how the implementation of Probolinggo district regents regulations number 18 year 2018 regarding one-stop Integrated, Online and direct licensing services (JEMPOLAN PTSP) against the acceleration of licensing services. This research uses descriptive qualitative research methods, namely by collecting data through observation, interviews and documentation.

The results of this study where the implementation of this policy uses the theory of Van Metter and Horn (in Agustino, 2016: 133-136) through several indicators of the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agencies, attitudes/dispositions of disposing agents, communication between organizations and implementing activities, and the economic, social and political environment. Implementation of Probolinggo regent regency policy number 18 year 2018 regarding pickup services, online and direct one-stop integrated licensing PTSP topnotch has been running quite well, it is seen from the response of the community and also the procedures for its implementation. What has been done in general has been carried out in accordance with regulations and standard operating procedures that have been regulated and determined by the local government. Besides that, the Probolinggo regency government continues to strive to provide quality services in accordance with the principles of public service delivery and carry out services in accordance with service standards.

Keywords : Implementation, Government Regulations, Service